

ORGANISASI KONPERENSI ISLAM

Oleh: Prof. Drs. H.A. Muin Umar

Dalam kesempatan ini saya ingin memperkenalkan suatu organisasi internasional yang sudah cukup terkenal yang bernama Organisasi Konperensi Islam (The Organization of the Islamic Conference) yang disingkat dengan OKI.

Untuk ini saya mempergunakan karya 'Abdullah al-Ahsan yang berjudul *OIC The Organization of the Islamic Conference* yang diterbitkan pada tahun 1988 oleh The International Institute of Islamic Thought, Herndon, Va.USA.

Dr. Abdullah al Ahsan, dilahirkan di Pakistan pada tanggal 15 Januari 1950, dan sebagai ahli masalah-masalah Timur Tengah, dan karya-karyanya mengenai Islam mendapat pujian secara luas di kalangan para ahli. Usianya relatif masih muda, namun dia telah banyak menulis karya-karya ilmiah. Pendidikan yang dijalaninya ialah:

1. Pada tahun 1976, menyelesaikan studinya di Quaid-i-Azam University di Islamabad Pakistan, dengan memperoleh gelar M.Sc. dalam bidang sejarah.
2. Pada tahun 1981, menyelesaikan studinya di McGill University, Montreal Canada dengan memperoleh gelar M.A. dalam bidang Islamis Studies.
3. Pada tahun 1985 menyelesaikan program doktornya di University of Michigan.

Karya-karyanya banyak yang sudah diterbitkan, termasuk tulisan-tulisan mengenai Dunia Islam dewasa ini dan mengenai masalah-masalah Timur Tengah, yang antara lain dimuat dalam majalah ilmiah *The American Journal of Islamic Social Sciences* (AJISS) dan di dalam *Journal of the Institute of Muslim Minority Affairs*.

Adapun penerbit karyanya yang kita perkenalkan sekarang ini ialah The International Institute of Islamic Thought yang berkedudukan di Washington, DC.

Organisasi ini pada tahun 1981 yang tujuan utamanya adalah untuk melestarikan pemikiran-pemikiran Islam dan untuk lebih memperkenalkan ajaran-ajaran Islam, serta mengembangkan dan menerbitkan buku-buku ilmiah mengenai Islam yang diperuntukkan bagi para mahasiswa di perguruan tinggi tingkat strata satu, sehingga para mahasiswa dan para pembaca lainnya dapat

mengetahui pandangan-pandangan islam mengenai segala aspek kehidupan manusia.

IIIT juga memberikan prioritas dalam bidang ilmu pengetahuan:

1. *Bidang Metodologi*, yang dianggap sebagai dasar bagi perkembangan orisinal semua pengetahuan kemanusiaan.
2. Bidang-bidang *behavioral sciences*, seperti psikologi, sosiologi, dan anthropologi, di mana pemahaman terhadap manusia dan masyarakat dipelajari dan perkiraan dasar terhadap manusia dan masyarakat ditegakkan. Semua bidang-bidang ilmu pengetahuan lainnya tentang manusia dan masyarakat mempergunakan dan menerapkan informasi dan pengetahuan tentang manusia dan masyarakat di dalam bidang-bidang ini dan menggali pula di mana cara-cara dan ajaran-ajaran Islam yang berhubungan dengan manusia dan masyarakat.
3. *Bidang pendidikan*, di mana training dan perkembangan sikap manusia, pemikiran, persepsi dan jati diri ditempatkan.
4. *Bidang ilmu politik*, yaitu melakukan studi mengenai perkembangan pemahaman manusia, organisasi, kelompok dan interaksi masyarakat dan pencapaian-pencapaian yang dilakukan di dalam bidang politik.
5. Bidang ekonomi dan informasi, yang telah banyak dilakukan penelitiannya.
6. Bidang sejarah, kesusasteraan, kesenian, ilmu pengetahuan alam dan teknologi.

Buku *The Organization of the Islamic Conference* yang diterbitkan ini merupakan suatu buku teks dalam bidang ilmu politik pada tingkat strata satu yang dimasukkan dalam organisasi-organisasi internasional. Perhatian di dalam bidang ini merupakan salah satu bidang penting di dalam lembaga IIIT semenjak permulaan berdirinya, sebab menurut lembaga ini, ilmu politik merupakan suatu bidang yang perlu dikembangkan dan ditingkatkan agar tercapai hal-hal yang memuaskan. Sedangkan bidang lainnya yang sangat penting adalah *pendidikan*.

Menurut lembaga ini kegagalan ummat Islam di tahun-tahun terakhir ini dengan mudah dapat dilacak karena kegagalan mereka di dalam berprestasi di dua bidang ini, dalam usaha pembinaan masyarakat. Disertasi Dr. Abdulhamid 'A Abu Sulaiman tahun 1973 yang berjudul *The Islamic Theory of International Relations* dari Pennsylvania University memusatkan perhatiannya di dalam masalah ini. Buku ini sudah diterbitkan oleh IIIT dengan judul *The Islamic Theory of International Relations : New Directions for Islamic Thought and Methodology*.

Dr. A. Abu Sulaiman juga menulis hasil-hasil penelitiannya yang berhubungan dengan subyek ini yang disajikannya pada *Second International Conference of the World Assembly of Muslim Youth* tahun 1973 di Riyad dengan judul *Politics and Government in Islam*.

The Association of Muslim Social Scientist juga menaruh perhatian di dalam bidang ini. Pada tahun 1976 sidang tahunan yang diadakan khusus memusatkan perhatiannya mengenai Islamization of Political Science. Sebagian makalahnya sudah dimuat di dalam *The American Journal of Islamic Social Sciences* yang diterbitkan bersama oleh IIIT dan AMSS (Association of Muslim Social Scientists).

Selama karirnya sebagai dosen dan ketua jurusan ilmu politik di Universitas Riyad, Dr. Abu Sulaiman berhasil merumuskan pandangan-pandangan Islam mengenai ilmu politik.

Demikianlah secara ringkas dikemukakan di sini mengenai peran IIIT di dalam bidang penerbitan, di mana salah satu di antaranya adalah karya Abdullah al-Ahsan ini yang mengenai Organisasi Konperensi Islam yang telah diperkenalkan kepada para mahasiswa perguruan tinggi umum yang khusus mempelajari ilmu politik, dan juga telah disebarkan kepada perpustakaan-perpustakaan Islam di seluruh dunia. Maksud penyebaran ini menurut IIIT adalah:

1. Memperkenalkan suatu karya ilmiah bermutu di dalam bidang politik dan suatu studi analisa mengenai suatu organisasi politik internasional.
2. Memberi kesempatan kepada para mahasiswa, guru besar dalam bidang ilmu politik dan hubungan internasional untuk memperoleh suatu buku teks perguruan tinggi yang bermutu mengenai OKI. Sebab menurut IIIT belum ada karya ilmiah yang sudah diterbitkan mengenai OKI ini. Bahkan menurut IIIT banyak para peneliti, penulis tidak begitu tertarik untuk menulis OKI ini, dan banyak perpustakaan-perpustakaan perguruan tinggi tidak mempunyai koleksi dan informasi mengenai perkembangan dan tujuan dari OKI ini, padahal banyak juga mahasiswa ingin mengetahui sekitar OKI sebab bagaimanapun organisasi ini banyak diwakili oleh dunia ketiga, semua negara-negara dari Dunia Islam.

Adapun isi buku ini pada garis besarnya meliputi tentang filsafat OKI, asal usul pertumbuhannya dan keanggotaannya, dan lain-lain.

II

Dasar ideologi diperlukan untuk membentuk sesuatu kelompok atau masyarakat. Ini juga dilakukan pada organisasi-organisasi internasional seperti PBB, MEE, OAU dan Liga Arab. Dalam hal ini Abdullah al-Ahsan mengutip karya Harold K. Jacobson yang berjudul *Networks of Interdependence : International Organizations and the Global Political System*, yang menyatakan bahwa ada tiga pemikiran utama menyebabkan munculnya berbagai macam organisasi internasional.

1. Keinginan untuk menggali potensi yang berhubungan dengan perkembangan-perkembangan teknologi untuk tujuan-tujuan perdagangan.

2. Organisasi-organisasi internasional dibentuk dalam rangka untuk memperoleh keamanan dan kemandirian bagi orde politik tertentu.
3. Untuk memajukan tujuan-tujuan kemanusiaan dan untuk menangani dan meningkatkan usaha-usaha sosial dan hak-hak asasi manusia, seperti terbentuknya *intergovernmental organizations* (IGOs), dan *inter-non-governmental organizations* (INGOs). Bila dilihat dari segi sejarah, umat manusia menjadi kapok dengan adanya dua perang dunia pada abad kedua puluh ini.

Berbeda dengan organisasi internasional yang ada, maka OKI menurut Abdullah al-Ahsan dasarnya sudah diletakkan pada masa 14 abad yang lalu sewaktu suatu masyarakat Islam baru dibentuk di Arabia di bawah kepemimpinan Muhammad saw. Karena itu dasar filosofisnya dirumuskan di dalam al-Quran, yaitu apa yang disebutnya dengan Konsep Ummat di dalam al-quran. Penulis buku OIC ini telah meneliti bahwa terdapat enam puluh empat kali perkataan *ummah* di dalam al-Quran, tiga belas diantaranya adalah dalam bentuk jamak (*umam*). Secara khronologis ada lima puluh tiga kali disebut dalam surat Makkiah dan sebelas kali di dalam surat Madaniyah. Para sarjana berbeda pendapat mengenai asal usul perkataan *ummah* ini, dan mereka tidak setuju bahwa perkataan *ummah* ini berasal dari bahasa Arab, melainkan dipinjam dari bahasa Ibrani atau bahasa Aram. Namun Abdullah al Ahsan tidak mempermasalahkannya dari mana asal kata ini, yang penting bahwa al-Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab, di mana orang Arab pada waktu itu memahaminya.

Asal arti dari perkataan *ummah* menurut Muhammad Asad adalah sekelompok yang hidup dengan karakteristik dan kebiasaan-kebiasaan yang sama, sebagaimana firman Allah:

وما من دابة ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا
 في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون

(Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan ummat-ummat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun di dalam al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan). Al An'Aam: 38.

Di sini dinyatakan bahwa setiap species merupakan suatu *ummah*, sebab semuanya berasal dari satu sumber (*umm*). Semua ummat manusia merupakan satu *ummah* semenjak permulaan kejadiannya, karena juga berasal dari sumber yang satu, sebagaimana difirmankan oleh Allah swt.:

وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلّفوا ولولا كلمة سبقت
 من ربك لقتضى بينهم فيما فيه يختلفون

(Manusia dahulunya hanyalah satu ummat, kemudian mereka berselisih. Kalau tidaklah karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu, pastilah telah diberi keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu). Yunus: 19.

Dengan demikian walaupun pada mulanya merupakan satu ummat namun dengan adanya kesanggupan berpikir, timbullah perbedaan-perbedaan di antara ummat manusia, sehingga terbagi kepada bermacam-macam ummat. Menurut al-Quran juga, ummat dalam sejarah datang dan pergi, sebagaimana yang difirmankan Allah swt.:

كذلك أرسلناك في أمة قد دخلت من قبلها أمم لتتلوا عليهم الذي
أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو
عليه توكلت وإليه متاب

(Demikianlah, Kami telah mengutus kamu pada suatu ummat yang sungguh telah berlalu beberapa ummat sebelumnya, supaya kamu membacakan kepada mereka (Al-Quran) yang Kami wahyukan kepadamu, padahal mereka kafir kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Katakanlah : "Dialah Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia; Hanya kepada-Nya aku bertawakkal dan hanya kepadaNya aku bertaubat). Ar Ra'd : 30.

Cukup banyak ayat--ayat al-Quran yang dikutip untuk menjelaskan tentang *ummah* dengan segala macam aspeknya. Termasuk menjelaskan konsep *ummah* secara filosofis dan historis. Pada umumnya *ummah* merupakan suatu masyarakat (community) yang didasarkan dengan ide-ide tertentu, yang ajarannya mengarah kepada Tauhid. Ummat Muhammad merupakan suatu *ummah* yang disebut dengan *ummatan wasathan* dan juga sebaik-baik *ummah* yang diciptakan oleh Allah swt. (*khaira ummatin*).

Selanjutnya Abdullah al Ahsan menerangkan tentang perkembangan masyarakat Islam di bawah kepemimpinan Muhammad saw., dan perkembangan institusi khalifah sewaktu Muhammad saw. wafat.

Pada bagian kedua bukunya disajikan mengenai situasi dunia Islam setelah hapusnya kekhalifahan, yang pada umumnya berada di dalam kebingungan. Ini disebabkan karena kaum Muslimin sepanjang sejarah mengidentifikasikan dirinya dengan institusi ini. Sangat sukar bagi kaum Muslimin pada waktu itu menyusun suatu masyarakat Islam tanpa adanya institusi khalifah. Secara politis dunia Islam pada waktu itu sangat lemah untuk menciptakan suatu masyarakat Islam dengan kepemimpinan tunggal. Sebahagian besar wilayah Islam merupakan jajahan dari kekuasaan Eropah, dengan demikian tidak cukup kuat untuk mengadakan suatu pimpinan bagi

semua ummat Islam. Pemimpin-pemimpin politik dan para ulama melibatkan diri mereka di dalam diskusi bagaimana mengisi kekosongan yang disebabkan karena hapusnya institusi kekhalifahan ini, sehingga kaum Muslimin dapat menjadi suatu ummat. Maka konperensi-konperensi diadakan untuk membahas masalah ini.

Konperensi pertama diadakan di Kairo pada bulan Mei 1926, yang dihadiri oleh utusan-utusan dari Mesir, Libia, Tunisia, Marokko, Afrika Selatan, Hindia Belanda, Johore, British India, Yaman, Hijaz, Palestina, Irak dan Polandia. Karena sebahagian besar dunia Islam masih berada di bawah kekuasaan kolonial, maka utusan-utusan ini tidak mewakili negara, tetapi hanya sebagai perorangan saja. Pada waktu itu tidak hadir utusan dari Turki, Persia, Afghanistan, Nejd dan Rusia. Karena utusan-utusan dalam konperensi ini bukan dari utusan pemerintah, maka diputuskan : Bahwa sangat diperlukan bahwa semua utusan kaum Muslimin dapat hadir dalam sesuatu pertemuan, yang diadakan di suatu negara yang dipilih oleh ummat Islam, sehingga ummat Islam mendapat kesempatan untuk membahas kemungkinan menghidupkan kembali lembaga kekhalifahan sesuai dengan syari'ah.

Konperensi juga menghimbau semua ummat Islam agar tidak henti-hentinya membicarakan masalah kekhalifahan ini, yang dianggap sebagai roh dan penjelmaan Islam. Konperensi juga menekankan agar ummat Islam bekerja-sama untuk mewujudkan lembaga kekhalifahan ini. Namun himbauan ini tidak memberikan hasil apapun, sehingga tidak ada lagi konperensi yang membahas mengenai lembaga kekhalifahan ini.

Pertemuan kedua pemimpin-pemimpin Islam dari berbagai belahan dunia Islam diadakan di Mekkah pada bulan Juni 1926 yang disponsori pemimpin baru Jazirah Arab Abdul Aziz Ibn Su'ud (w.1973), namun konperensi ini mendapat kecaman keras dari Pemerintah Turki apabila ditampilkan masalah kekhalifahan. Oleh karena itu masalah kekhalifahan ini tidak diungkit lagi dalam konperensi ini. Dalam konperensi ini dipusatkan perhatian mengenai masa depan Hijaz khususnya mengenai *haramain* Mekkah dan Madinah, dan bagaimana cara penyelenggaraan haji. Ibn Sa'ud pada waktu itu merebut kota Mekkah dan Madinah dari Syarif Husain. Dalam konperensi itu pemimpin-pemimpin Islam mempercayakan pengurusan *Haramain* yang berhubungan dengan ibadah haji. Di samping itu dibentuk suatu institusi yang permanen yang disebut dengan *Mu'tamar al-'Alām al-Islamy*, dan diputuskan bahwa organisasi ini akan mengadakan pertemuan tiap-tiap tahun di Mekkah bersamaan dengan musim haji.

Walaupun demikian pertemuan ternyata tidak dapat diadakan pada tiap-tiap tahun. Konperensi selanjutnya yang dihadiri oleh utusan ummat Islam sedunia diadakan di Jerusalem pada tahun 1931. Mufti Jerusalem, Amin al-Husaini (w.1975), pemimpin khilafah India, dan beberapa pemimpin Islam lainnya mengajak konperensi menanggapi keputusan mandat yang

berhubungan *Dinding Barat Masjid al-Aqsha (Hāith alMabka)*, dan tanggapan terhadap rencana Zionis menguasai Palestina secara umum. Konperensi ini rupanya dianggap sebagai ancaman terhadap ide negara sekuler, karena itu pemikiran-pemikiran dalam konperensi itu mendapat tantangan dari beberapa pemimpin. Penganut sekularisasi di Mesir menyatakan bahwa anti sekularisasi itu berlawanan dengan evolusi modern yang menuju kepada terbentuknya negara nasional. Sedangkan Turki secara resmi menyatakan apa yang dikemukakan konperensi ini tidak ada nilainya sama sekali yang mencoba mempergunakan agama di dalam politik. Inggris sebagai pemegang mandat di Palestina memperingatkan kepada penyelenggara agar tidak membicarakan masalah-masalah internal atau external dari negara-negara sahabatnya di beberapa belahan dunia Islam, yang waktu itu umumnya sebagai penjajah. Di kalangan pemimpin-pemimpin agama, yaitu dari utusan al-Azhar menentang pemikiran penyelenggara yang ingin mendirikan suatu universitas Islam di Jerusalem. Walikota Muslim di Jerusalem ditentang sebab adanya partisipasi Mufti padahal mereka berdua bermusuhan secara pribadi. Akhirnya tantangan berat datangnya dari tekanan zionisme. Semua faktor-faktor ini menyebabkan utusan-utusan pemerintah merasa kecewa untuk menghadiri konperensi. Bahkan Ibn Sa'ud sendiri, yang bertanggung jawab mengadakan pertemuan di Mekkah mengirimkan delegasi agak terlambat.

Walaupun banyak masalah-masalah ini, kemajuan konperensi hanya mengalami sedikit saja kesulitan. Menghadapi instruksi-instruksi pemerintahan Inggris di Palestina, konperensi mengajukan protes, menentang sistem mandat dan menentang kebijaksanaan Perancis di Afrika Utara, anti kebijaksanaan Islam yang dilakukan pemerintah Soviet di Asia Tengah, dan kegiatan-kegiatan Italia di Libia. Utusan partai Wafd dari Mesir diusir dari Palestina oleh penguasa Inggris, karena kritik-kritik mereka yang tajam terhadap kekuasaan kolonial di negeri-negeri Islam. Namun konperensi berhasil membentuk suatu dewan eksekutif Mu'tamar yang terdiri dari 25 anggota, termasuk 3 orang dari Mesir, 4 dari India, 4 dari Afrika Barat Daya, 1 dari Persia, 1 dari Jawa, 1 dari Turki yang tinggal di Warsawa, 1 dari Bosnia, dan 10 dari Arab Palestina, Syria, Irak dan Arabia. Salah seorang official dari Persia, Sayyid Ziyauddin Tabataba'i, dipilih sebagai sekretaris jenderal. salah satu hasil nyata dari Mu'tamar ini adalah keberhasilan mereka mengakhiri perang antara Saudi Arabia dan Yaman, tahun 1934, kemudian sesudah itu tidak ada lagi hal-hal yang dapat dicatat, karena selama Perang Dunia Kedua, kegiatan-kegiatan Mu'tamar terhenti sama sekali.

Kendatipun di dalam konperensi Jerusalem sudah diputuskan bahwa Mu'tamar akan bertemu untuk tiap-tiap dua tahun, namun tidak sekalipun konperensi dapat diadakan sampai tahun 1949. Sejumlah faktor-faktor yang dapat disumbangkan bagi kebangkitan Islam adalah: Tercapainya kemerdekaan bagi negara-negara yang sebahagian besar rakyatnya beragama Islam, dan

untuk selanjutnya mendambakan adanya persatuan umat Islam.

Akhir tahun 1940-an dan awal tahun 1950-an adanya usaha-usaha menyatukan dasar politik bagi negara-negara Muslim di PBB. Maka muncullah Blok Islam yang berbeda dengan Blok Barat dan Blok Komunis. Dua masalah yang mendasar yang disumbangkan bagi kegiatan-kegiatan yang sama adalah:

1. Masih banyak negara-negara yang penduduknya banyak beragama Islam masih belum mencapai kemerdekaannya.
2. Pembentukan Negara Israel yang didukung oleh Super Power.

Salah satu langkah penting menuju persatuan umat Islam sesudah perang adalah bangkitnya kembali kegiatan-kegiatan Mu'tamar al-'Alam Islamy. Suatu konperensi Mu'tamar diadakan di Karachi pada tahun 1949. Kemudian diikuti konperensi lainnya pada tahun 1951 di kota yang sama. Sejumlah proyek yang berhubungan dengan perdagangan, pendidikan dan sosial dirumuskan di dalam konperensi ini. Diusulkan juga pembentukan Bulan Sabit Merah untuk melakukan pertolongan bagi para penderita di negara-negara Muslim, mendirikan suatu lembaga yang mengurus pendidikan, sehingga dengan demikian dapat diadakan penukaran guru besar dan sebagainya, serta bantuan-bantuan terhadap penelitian. Di samping juga direncanakan seminar-seminar yang berkenaan dengan studi Islam yang ditinjau dari segala aspeknya.

Banyak usaha-usaha lain yang diadakan oleh Mu'tamar antara lain Konperensi Internasional mengenai Ekonomi Islam yang diadakan di Karachi pada tahun 1949. Tujuan konperensi ini adalah untuk memperkuat kerjasama di kalangan negara-negara Muslim dalam bidang perdagangan, ekonomi dan keuangan, dan pembangunan umum lainnya di dunia Islam. Kemudian diikuti dengan konperensi Islam Internasional yang kedua yang diadakan di Teheran tahun 1950. Konperensi Kedua ini mengeluarkan rekomendasi dengan membentuk suatu sekretariat permanen untuk menangani pekerjaan yang meliputi:

1. Koleksi, kompilasi, analisa dan menyebarluaskan statistik yang berkenaan dengan masalah-masalah sosial dan ekonomi.
2. Mempersiapkan buku Statistik tiap-tiap tahun.
3. Melakukan penelitian terhadap kondisi-kondisi sosial ekonomi, yang telah dicapai oleh beberapa negara.
4. Penelitian mengenai masalah-masalah ekonomi di beberapa negara.
5. Membantu kepada tiap-tiap negara dalam mempersiapkan rencana-rencana pembangunannya.
6. Mempersiapkan planning pembangunan regional dengan membantu tenaga ahli bila diperlukan.
7. Membantu lembaga-lembaga teknik, ilmu pengetahuan, pendidikan dan penelitian.

Keinginan untuk bekerja sama di kalangan negara-negara Muslim makin bertambah, dan bukan saja di dalam bidang ekonomi dan kebudayaan tetapi juga di dalam pengembangan intelektual.

Walaupun semangat sudah berkobar-kobar, namun pemikiran-pemikiran persatuan dan kerjasama di antara negara-negara Muslim gagal menghasilkan sesuatu yang praktis dan positif.

Tidak ada konferensi dilaksanakan dalam rangka memecahkan masalah yang pernah dilontarkan oleh Mufti Besar Jerusalem Amin al-Husaini. Bahkan Mu'tamar 'Alam al-Islamy tidak pernah bertemu sampai tahun 1962. Yang menjadi pertanyaan besar adalah kenapa ide persatuan ummat Islam ini tidak segera dilaksanakan, padahal banyak negara-negara Muslim sudah mencapai kemerdekaannya.

Permulaan tahun 1960-an mulai ada keinginan untuk kegiatan-kegiatan persatuan ummat Islam. Mu'tamar Alam al-Islamy mengadakan konferensinya yang kelima dan keenam, masing-masing pada tahun 1962 di Baghdad dan tahun 1964 di Mogadishu. Pada waktu itu *Rabithah al-'Alam al-Islamy* didirikan yang relatif lebih berhasil dari Mu'tamar al-'Alam al-Islamy. Menghadapi tantangan Nasionalisme Arab yang dikumandangkan oleh Presiden Mesir Jamal Abdel Nasser, maka Putra Mahkota Faisal dari Sa'udi Arabia memprakarsai kesatuan ummat Islam berdasarkan dengan konsep *ummah*, yang dianggap sebagai perlawanan terhadap radikalisme Nasser dan sosialisme yang revolusioner. Oleh karena itu Faisal mengharapkan agar Islam dijadikan sebagai ideologi tandingan bagi sosialisme dan radikalisme Nasser. Pemerintah Saudi Arabia menyelenggarakan suatu konferensi Islam Internasional pada bulan Mei 1962 di Mekkah untuk membahas cara-cara untuk menghadapi sekularisme di dunia Arab dan dunia Islam. Konferensi ini dihadiri baik utusan-utusan pemerintah maupun utusan-utusan yang non-pemerintah dari negara-negara Muslim. Kendatipun konferensi ini tidak begitu mendapat dukungan dari negara-negara Muslim, namun banyak utusan-utusan pemerintah yang ikut dalam konferensi ini, dibandingkan dengan keikutan mereka di dalam konferensi yang diadakan oleh Mu'tamar al-'Alam al-Islamy. Konferensi inilah yang mendirikan *Rabithah al-'Alam al-Islamy*, di mana tujuannya yang utama adalah kegiatan-kegiatan misi Islam.

Kalau hanya program kegiatan-kegiatan misi Islam tidak begitu memuaskan bagi Faisal, karena tujuan utamanya lebih dari itu. Faisal pada tahun 1964 menjadi Raja Saudi Arabia. Dia melanjutkan usahanya untuk menjadikan kerajaannya berdasarkan kepada identitas Islam sebagai lawan dari kelompok nasionalis dan pemikiran-pemikiran sekuler. Oleh karena itu Raja Faisal berkunjung ke Iran, Jordan, Sudan, Turki, Pakistan, Marokko, Guinea, Mali dan Tunisia selama pertengahan tahun-tahun 1960-an, untuk mempopulerkan kaum Muslimin di bawah satu atap. Dia mengajak agar

diadakan konperensi tingkat tinggi negara-negara Muslim untuk membahas masalah-masalah yang dihadapi ummat Islam. Walaupun ajakannya ini didukung oleh Somalia, Iran, Marokko, Jordania dan Pakistan, namun dia mendapat kecaman keras dari pemerintah Mesir, Damaskus dan Baghdad. Untuk itu Raja Faisal menunda usaha-usahanya untuk sementara waktu. Pemimpin-pemimpin politik Islam lainnya, terutama Perdana Menteri Malaysia Tengku Abdurrahman, dilaporkan juga aktif berusaha untuk tujuan-tujuan yang sama. Walaupun demikian usaha-usaha yang dilakukan oleh Tengku Abdurrahman tidak terikat dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh Raja Faisal.

Situasi rupanya terjadi perubahan pada negara-negara nasionalis Arab yang terkemuka pada tahun 1967, karena negara-negara tersebut dikalahkan oleh Israel dalam Perang Enam Hari. Segera sesudah itu Raja Faisal kembali mengajak negara-negara Muslim untuk bekerja sama, khususnya untuk membebaskan Jerusalem dari pendudukan asing. Raja Faisal mengusulkan agar diadakan suatu Konperensi Tingkat Tinggi Negara-negara Muslim, tetapi usulnya ini tidak mendapat perhatian. Kekalahan Arab dari Israel tidaklah merupakan angin yang akan menghancurkan ide-ide nasionalisme Arab dan sekularisme Arab di bawah kepemimpinan Presiden Jamal Abdel Nasser dan pemimpin-pemimpin sekuler lainnya, walaupun ada sedikit kekurangan popularitasnya, karena itu ide-ide tradisional Muslim, kesatuan ummat Islam yang memang sudah ada di dalam sanubari orang-orang Islam, dihidupkan kembali.

Kemudian pada tanggal 21 Agustus 1969, dunia Islam dikejutkan dengan adanya pembakaran Mesjidil Aqsha di bawah pendudukan Israel. Mantan Mufti Jerusalem Amin al-Husaini mengirimkan kawat kesemua negara Muslim, dengan harapan agar segera diadakannya Konperensi Tingkat Tinggi untuk membahas peristiwa yang mengejutkan itu. Negara-negara Muslim non Arab seperti Indonesia, Iran, Pakistan dan Turki secara bersama-sama mengeluarkan suatu resolusi di PBB yang mengutuk tindakan Israel itu. Protes berdatangan dari seluruh negara-negara Muslim, dan mendukung diadakannya suatu KTT Islam. Dengan kejadian itu menambah popularitas dan kesadaran *ummah*. Sebagai hasilnya Jamal Abdel Nasser yang pada masa sebelumnya selalu menentang diadakannya KTT Islam, karena dikhawatirkan akan memecah Gerakan Non Blok, sudah menunjukkan persetujuannya untuk KTT Islam itu. Dalam sidang darurat Liga Arab diusulkan agar Saudi Arabia atau Marokko memprakarsai KTT itu. Dengan demikian pemerintahan Muslim sudah melibatkan diri ke dalam suatu ide tradisional yang sebelumnya dianggap tidak berharga oleh para intelektual Muslim yang berpendidikan Barat.

KTT Islam yang pertama yang dihadiri oleh utusan-utusan dari 24 negara diadakan pada tanggal 22–25 September 1969 di Rabat ibukota Marokko. Pada akhir dari empat hari konperensi ini diumumkan suatu deklarasi bahwa pemerintah-pemerintah Islam harus saling tukar pandangan untuk saling mengerti antara satu sama lainnya, dan mengadakan suatu kerjasama yang erat di dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan bidang-bidang spiritual, yang diilhami dengan ajaran-ajaran Islam. Konperensi juga memutuskan agar diadakan konperensi tingkat menteri pada tahun berikutnya untuk membahas:

1. Hasil Konperensi Tingkat Tinggi.
2. Untuk membentuk suatu sekretariat yang permanen agar dapat memperkuat kerja-sama di antara negara-negara anggota.

Ini merupakan suatu perkembangan yang cukup berarti bagi kehidupan Islam modern, sebab sesudah berakhirnya institusi kekhalifahan tahun 1923 tidak ada lagi institusi politik yang ditaati oleh semua orang-orang Islam.

Konperensi Menteri-Menteri Luar Negeri Islam Pertama diadakan pada tanggal 23–25 Maret 1970 di Jeddah. Keputusan-keputusan dikeluarkan yang ada hubungannya dengan pembentukan suatu Sekretariat Jenderal untuk organisasi baru ini. Kantor Sekretariat Jenderal berada di Jeddah. Tengku Abdurrahman Perdana Menteri Malaysia meletakkan jabatannya sebagai perdana menteri, kemudian menjadi Sekretaris Jenderal Pertama untuk OKI ini. Suatu piagam bagi organisasi disetujui oleh Konperensi para Menteri Luar Negeri Ketiga tahun 1972. Di dalam satu fasal dari piagam itu disebutkan nama bagi

lembaga baru ini yaitu *منظمة المؤتمر الإسلامي*, di dalam bahasa Arab. "The Organization of the Islamic Conference", di dalam bahasa Inggris dan "Organization de la Conference Islamique", di dalam bahasa Perancis, "Organisasi Konperensi Islam" di dalam bahasa Indonesia.

Pada tahun-tahun permulaan OKI berkembang dengan baik. Anggotanya bertambah dari 24 menjadi 46 negara pada tahun 1986. Negara-negara yang secara lantang menentang ide Konperensi Puncak Islam tahun 1969, secara berangsur-angsur menjadi anggota OKI ini. Di antara anggota-anggota adalah republik-republik Islam, kerajaan-kerajaan, negara-negara yang dipimpin oleh diktatur militer, negara demokrasi nasional, republik sosialis demokrat, republik-republik sosialis, republik-republik demokrasi rakyat. Bila dilihat dari standar ekonomi dunia, anggota-anggotanya ada negara-negara berpenghasilan rendah dan ada pula negara-negara yang berpenghasilan tinggi per capita. Sebahagian anggotanya memiliki potensi sumber daya manusia, tapi negaranya miskin, sedangkan ada pula sebahagian negaranya kurang memiliki sumber daya manusia, tetapi kaya. Masing-masing anggota ini mempunyai potensi-potensi khusus, dan apabila ini digabungkan akan menjadi potensi

pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sebahagian negara-negara ini mempunyai warisan kebudayaan yang tinggi, walaupun sistem nilai tradisional mereka masih menghadapi suatu tantangan yang kuat dari peradaban Eropah yang sekuler. Tantangan ini segera dijawab oleh kepala-kepala pemerintahan dari organisasi OKI dengan suatu deklarasi: "Bahwa ketaatan yang sungguh-sungguh terhadap Islam dan ajaran-ajaran Islam dan nilai-nilainya merupakan suatu cara kehidupan yang memberikan perlindungan kepada kaum Muslimin menentang bahaya-bahaya yang mengancam mereka. Islam hanya satu-satunya jalan yang dapat memberikan kekuatan, kemuliaan, kemakmuran dan masa depan yang baik. Islam adalah janji dan jaminan keaslian *ummah* untuk melindunginya dari arus materialisme yang tirani. Islam merupakan perangsang yang kuat bagi semua pemimpin dan rakyat di dalam perjuangan untuk membebaskan tempat suci mereka, dan mengembalikan hak mereka di dunia sehingga sederajat dan seirama dengan negara-negara lain, memperjuangkan persamaan, perdamaian dan kemakmuran bagi seluruh ummat manusia".

Mereka juga menyatakan: "Merupakan suatu tekad kita bahwa ummat yang berjumlah 1 miliar jiwa ini, terdiri dari berbagai macam ras, terbentang di dalam suatu wilayah yang sangat luas di permukaan bumi dan memiliki sumber-sumber yang sangat hebat, dibentengi oleh kekuatan spiritual untuk memanfaatkan potensi sumber dana dan daya dengan penuh, akan dapat mencapai posisi yang istimewa di dunia dan yang akan dapat mencapai kemakmuran sehingga dapat memberikan keseimbangan kemanfa'atan bagi seluruh ummat manusia".

Walaupun deklarasi ini dibuat pada tahun 1981 pada konperensi puncak ketiga, namun jelas dari deklarasinya yang terdahulu dan ucapan-ucapan yang dikeluarkan di dalam pertemuan-pertemuan OIC, bahwa kesadaran kebudayaan ini sudah ada semenjak permulaan berdirinya OIC. Proses pembentukan OIC sebagai suatu sistem organisasi tidaklah mulus jalannya. Dua tahun pertama nampak kesulitannya. Sekretaris Jenderal yang pertama Tengku Abdurrahman, menyatakan proses ini sebagai satu yang egoistis dan ketidak-acuhan. Pernyataan ini dikeluarkannya setelah melihat sikap-sikap dari sementara anggota mengenai OIC. Misalnya Mesir dan Afghanistan menurut Tengku Abdurrahman tidak menunjukkan keseriusannya. Dia juga mengeluh tentang sulitnya mengadakan komunikasi dalam membicarakan masalah-masalah yang penting, misalnya untuk mencari tuan rumah bagi penyelenggaraan konperensi tahunan para menteri luar negeri. Dia juga mengeluh mengenai iuran keuangan yang sudah disepakati bersama tetapi realisasinya sulit, padahal dana ini yang sangat diperlukan bagi kegiatan-kegiatan OKI. Banyak anggota-anggota membayar iuran kurang dari jumlah yang mereka sanggupi. Karena itu biaya-biaya hanya dikeluarkan oleh Malaysia, Iran, Pakistan dan Saudi Arabia.

Secara dramatis situasi berubah, ketika pada tahun 1973 sebahagian anggota OKI menjadi kaya raya sehingga mempunyai kemampuan untuk memberikan dana yang lebih besar. Pada tahun 1974 Konperensi Puncak Kedua diadakan di Lahore, Pakistan, suatu era baru muncul di dalam kehidupan OIC.

IV

Walaupun OIC didirikan dalam menjawab tantangan dari suatu peristiwa khusus, seperti pembakaran Mesjidil Aqsha di Jerusalem di bawah pendudukan Israel. Namun pemimpin-pemimpin politik Islam yang bertemu di Konperensi Puncak di Rabat menyadari kepada suatu keinginan yang lebih besar di negara-negara mereka untuk menciptakan suatu kesatuan ummat. Mengingat kepada keinginan ini, kepala-kepala pemerintahan Islam memutuskan untuk mendirikan suatu institusi politik yang permanen di mana mereka dapat saling tukar pandangan. Oleh karena itu piagam OIC yang muncul telah meletakkan dasar strukturnya dan prosedur-prosedur dasar sebagai suatu organisasi internasional yang didasarkan kepada ide dari negara-negara anggota yang berdaulat.

Piagam OKI kembali kepada konsep al-Quran mengenai *ummah*. Menyatakan keyakinan bahwa iman yang sama dari rakyat para anggota akan dapat merupakan suatu faktor yang paling kuat yang bisa menciptakan solidaritas di antara negara-negara anggota. Piagam juga menyatakan agar negara-negara peserta dapat menggalang semangat persaudaraan dan melindungi kemerdekaan mereka, dan warisan kebudayaan mereka dapat dijadikan prinsip-prinsip keadilan, toleransi dan non-diskriminasi. Di dalam mukaddimah piagam itu disebut bahwa anggota-anggota bertekad untuk bekerja keras untuk meningkatkan kemajuan, kemerdekaan ummat manusia di mana saja mereka berada. Ikut serta menyelesaikan dan mempersatukan usaha-usaha mereka dalam rangka untuk mengamankan perdamaian dunia, kemerdekaan, keamanan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya di seluruh dunia.

Adapun tujuan-tujuan dari organisasi ini disebutkan di dalam piagam:

1. Untuk meningkatkan solidaritas Islam di kalangan negara-negara anggota.
2. Menggalang kerja-sama di kalangan negara anggota dalam bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan kegiatan-kegiatan vital lainnya, dan mengadakan konsultasi di antara para negara anggota di dalam organisasi-organisasi internasional.
3. Berusaha untuk menghapuskan diskriminasi rasial dan menghapus kolonialisme dalam segala bentuknya.
4. Ikut serta mendukung perdamaian internasional dan keamanan internasional yang berdasarkan kepada keadilan.
5. Menggalang usaha-usaha untuk menjaga tempat-tempat suci dan mendukung rakyat Palestina untuk mencapai kemerdekaannya.

6. Memperkuat perjuangan kaum Muslimin untuk melindungi kemuliaan, kemerdekaan dan hak-hak nasional mereka.
7. Menciptakan suatu iklim yang layak untuk meningkatkan kerja sama dan pengertian di kalangan negara-negara anggota dan negara-negara lain.

Dalam fasal yang sama piagam menetapkan sejumlah prinsip-prinsip di mana negara-negara anggota harus bekerja sama dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan tersebut di atas. Dasar-dasar tersebut adalah:

1. Persamaan penuh di kalangan negara-negara anggota.
2. Menghormati hak menentukan nasib sendiri, dan tidak campur tangan di dalam masalah-masalah dalam negeri negara-negara anggota.
3. Menghormati kedaulatan, kemerdekaan dan integrasi teritorial masing-masing negara anggota.
4. Tiap-tiap persengketaan harus diselesaikan secara damai misalnya dengan perundingan, melalui penengah, rekonsiliasi atau arbitrase.
5. Tidak mempergunakan kekerasan terhadap integritas teritorial, kesatuan nasional dan kemerdekaan politik tiap-tiap negara anggota.

Ide kedaulatan nasional yang disebutkan di dalam piagam merupakan suatu hasil pemikiran Eropah sekuler. Piagam juga secara pasti mengesahkan ide Islam mengenai *ummah* sebagai dasar kerja sama di kalangan negara-negara Muslim. Dua dasar ini, yaitu konsep sekuler mengenai nasionalisme dan konsep Islam mengenai *ummah*, merupakan ancaman terhadap organisasi itu sendiri.

Ada empat komponen besar di dalam OKI yaitu:

1. Konperensi raja-raja dan kepala-kepala pemerintahan dan negara.
2. Konperensi para menteri luar negeri.
3. Sekretariat Jenderal dan organisasi-organisasi tambahan.
4. Mahkamah Islam Internasional.

Di samping itu ada sejumlah institusi-institusi dan organisasi-organisasi yang didirikan di dalam kerangka OKI. Institusi-institusi dan organisasi-organisasi ini dipolakan untuk bekerja secara independen di dalam sekretariat Jenderal dalam rangka menunjang pencapaian tujuan-tujuannya.

A. Konperensi Raja-raja dan Kepala-kepala Negara dan pemerintahan.

Konperensi Raja-raja dan Kepala-kepala Negara dan pemerintahan juga terkenal sebagai KTT Islam. Ini yang merupakan institusi dengan wewenang tertinggi di dalam OKI. Dengan melalui KTT Islam yang pertama seperti ini organisasi ini didirikan tahun 1969. Sampai tahun 1981 konsensus di dalam OKI adalah bahwa pertemuan-pertemuan KTT akan diadakan bila keinginan ummat memerlukannya. Oleh karena itu KTT kedua diadakan tahun 1974 dalam rangka mengkonsolidasi apa yang telah dicapai oleh sementara anggota pada tahun-tahun sebelumnya. KTT ketiga diadakan tahun 1981 sebagai satu

bagian peringatan permulaan abad kelima belas hijriyah. KTT ketiga mengadakan beberapa perubahan di dalam piagam, antara lain agar KTT diadakan setiap tiga tahun sekali. KTT keempat diadakan di Cassablanca tahun 1984 dan KTT kelima diadakan di Kuwait pada tahun 1987. KTT keenam dijadwalkan akan diadakan di Senegal. Konperensi Raja-raja dan Kepala-kepala negara dan pemerintahan juga diadakan dengan rekomendasi Konperensi para Menteri Luar Negeri Islam. Ini merupakan kebijaksanaan puncak yang dilakukan oleh institusi OKI.

B. Konperensi para Menteri Luar Negeri

Konperensi para Menteri Luar Negeri merupakan suatu pembuat keputusan penting di dalam OIC. Mendasarkan dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh KTT, konperensi para Menteri Luar Negeri membuat keputusan-keputusan reguler di dalam pertemuan-pertemuan tahunannya. Tambahan dari pertemuan-pertemuan tahunan, pertemuan-pertemuan luar biasa dari para Menteri Luar Negeri dapat diadakan atas permintaan salah satu anggota atau Sekretariat Jenderal dari OKI. Walaupun demikian permintaan ini harus disetujui oleh dua pertiga anggota. Persetujuan ini dimintakan melalui surat edaran kepada semua negara anggota. Fasal V dari piagam ini menjelaskan kewajiban-kewajiban dan fungsi-fungsi Konperensi para Menteri Luar Negeri seperti yang tersebut di bawah ini:

1. Mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut dengan kebijaksanaan umum konperensi.
2. Untuk melihat kembali kemajuan-kemajuan di dalam implementasi keputusan-keputusan dari sidang-sidang sebelumnya.
3. Melaksanakan resolusi-resolusi mengenai keinginan bersama yang ada hubungannya dengan maksud dan tujuan konperensi yang tercantum dalam piagam.
4. Untuk membahas laporan komite keuangan dan menyetujui anggaran biaya sekretariat jenderal.
5. Menetapkan tanggal dan tempat konperensi para menteri luar negeri selanjutnya.
6. Membicarakan masalah-masalah yang diajukan oleh satu atau beberapa anggota.
7. Mengangkat Sekretariat Jenderal dan empat orang asisten bagi Sekretaris Jenderal dengan rekomendasi Sekretaris Jenderal.

C. Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal merupakan organ eksekutif dari OKI, diciptakan menurut pola sekretariat Jenderal PBB. Sekretariat jenderal bertanggung jawab untuk semua kegiatan yang diperlukan untuk menindak lanjuti resolusi-resolusi dan rekomendasi-rekomendasi dari KTT dan Konperensi para Menteri Luar Negeri. Sekretariat Jenderal dikepalai oleh Sekretaris Jenderal OKI, yang

dibantu oleh empat asisten Sekretaris Jenderal. Sekretaris Jenderal dicalonkan oleh negara anggota dan dipilih oleh konperensi para Menteri Luar Negeri untuk masa jabatan empat tahun. Asisten Sekretariat Jenderal untuk masalah-masalah politik juga bertanggung jawab untuk departemen-departemen minoritas dan informasi Islam. Asisten Sekretaris Jenderal untuk masalah-masalah kebudayaan dan sosial juga bertanggung jawab bagi Dana Solidaritas Islam. Asisten Sekretaris Jenderal bertanggung jawab untuk bidang ekonomi, administrasi, dan keuangan. Asisten Sekretaris Jenderal keempat bertanggung jawab dalam masalah-masalah Baitul Maqdis dan Palestina. Selama adanya OKI ini sudah lima sekretaris jenderal yang memangku jabatan ini yaitu Syed Syarifuddin Pirza dari Pakistan, yang memangku jabatannya tahun 1984. Sedangkan sebelumnya adalah Tengku Abdurrahman, dari Malaysia, Hassan al-Tuohami dari Mesir, Ahmadou Karim Gaye dari Senegal dan Habib al-Chatty dari Tunisia.

D. Mahkamah Islam

Mahkamah Islam internasional merupakan salah satu pilar dan merupakan badan peradilan tertinggi dari OKI. KTT Islam di Thaif tahun 1981 memutuskan untuk membentuk badan peradilan yang sama polanya dengan International Court of Justice di Den Haag. Wewenang mahkamah ini meliputi:

1. Semua perkara-perkara yang diajukan kepada mahkamah ini, disetujui oleh anggota-anggotanya, seperti perkara-perkara yang ditetapkan dalam persetujuan-persetujuan dan perjanjian-perjanjian.
2. Membahas pertikaian-pertikaian yang terjadi antar sesama anggota.
3. Perbedaan-perbedaan yang mungkin muncul dalam memahami isi piagam OKI.
4. Memberi fatwa mengenai masalah-masalah hukum atas permintaan raja atau kepala-kepala negara dan pemerintahan dan lain-lain.

Mahkamah terdiri dari sebelas anggota yang ahli dalam bidang fiqh Islam yang dipilih oleh Konperensi para Menteri Luar Negeri atas pencalonan negara-negara anggota. Mahkamah ini berkedudukan di Kuwait, namun belum pernah berfungsi.

E. Komisi-komisi dan Komite-komite Khusus

OKI membentuk komite-komite dan komisi-komisi untuk memberikan perhatian khusus mengenai kepentingan-kepentingan khusus dari OKI. Dalam Konperensi para Menteri Luar Negeri keenam yang diadakan tahun 1975, dibentuk komite al-Quds untuk memberikan perhatian khusus dalam masalah Jerusalem dan Palestina. Sedangkan Konperensi para Menteri Luar Negeri kesepuluh memutuskan untuk menempatkan komite al-Quds ini dibawah pimpinan Raja Marokko. OKI menjelaskan tujuan-tujuan dan fungsi-fungsi komite al-Quds sebagai berikut:

1. Mempelajari situasi al-Quds.
2. Melaksanakan penerapan resolusi-resolusi yang sudah pernah diputuskan mengenai masalah ini atau masalah yang akan datang oleh Konperensi para Menteri Luar Negeri.
3. Menindak lanjutkan implementasi resolusi-resolusi mengenai al-Quds yang telah disahkan oleh organisasi-organisasi internasional.
4. Membuat proposal kepada negara anggota dan semua organisasi-organisasi mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk melaksanakan resolusi-resolusi.

F. Badan-badan Tambahan

1. *Islamic Solidarity Fund*

The Islamic Solidarity Fund (Dana Solidaritas Islam) dibentuk pada KTT Islam kedua yang diadakan di Lahore pada tahun 1974, dengan dua tujuan yaitu mengambil langkah-langkah yang mungkin untuk membangkitkan tingkat moral dan intelektual Kaum Muslimin sedunia dan menanggulangi keadaan-keadaan darurat yang disebabkan oleh bencana alam dan sebagainya. Juga tujuannya untuk memberikan dana sosial kaum Muslimin untuk keperluan pendirian rumah sakit, mesjid dan sebagainya.

2. *Al-Quds Fund*

Al-Quds Fund didirikan atas rekomendasi Konperensi para Menteri Luar Negeri yang ketujuh, dengan tujuan:

- 1) Mencegah dan melawan kebijaksanaan Judaisasi yang dilakukan Israel di daerah pendudukannya.
- 2) Melestarikan karakter Arab di kota Jerusalem.
- 3) Mendukung perjuangan rakyat Palestina di Jerusalem dan di wilayah-wilayah pendudukan lainnya.

3. *Statistical, Economic and Social Research and Training Center for the Islamic Countries* (Ankara Center).

Ankara Center ini didirikan berdasarkan resolusi konperensi kedelapan para Menteri Luar Negeri yang diadakan tahun 1977. Center ini ditetapkan untuk:

- 1) Mengevaluasi, studi dan mengumpulkan data dasar mengenai struktur ekonomi dan sosial negara-negara anggota.
- 2) Melakukan penelitian mengenai kemungkinan perkembangan hubungan dagang di kalangan negara-negara anggota, terutama dengan memberikan data yang diperlukan bagi pemasaran barang-barang dan jasa.
- 3) Mempelajari struktur industri di negara-negara anggota dan mencoba kemungkinan mengadakan kerja sama.

- 4) Menetapkan kemungkinan untuk perkembangan tingkat maximum dari sumber yang ada di negara-negara anggota.
- 5) Mempelajari persetujuan-persetujuan di dalam bidang sosial dan menetapkan kerangka persetujuan di dalam bidang sumber daya manusia dan keamanan sosial.
- 6) Mengadakan kursus-kursus di dalam bidang statistik dan informasi yang dapat bermanfaat bagi negara anggota.

Center ini juga memiliki fasilitas perpustakaan, penerbitan *Journal of Economic Cooperation Among Islamic Countries*. Di samping itu menerbitkan buku-buku yang didasarkan kepada hasil-hasil penelitian.

4. *Research Center for Islamic History, Art and Culture*

Berdasarkan resolusi yang ada maka OKI memutuskan untuk mendirikan a Center for Islamic History, Art and Culture dengan tujuan-tujuan berikut:

- 1) Meletakkan suatu lembaga di mana para ilmuan, sejarawan, penulis, seniman yang berdatangan dari negara-negara Muslim, untuk melakukan penelitian mengenai warisan-warisan umum yang sama, yang memungkinkan munculnya pengertian yang sama di dunia Islam.
- 2) Menciptakan kondisi-kondisi obyektif untuk dapat bekerja-sama di kalangan para sejarawan dan penulis-penulis dari negara-negara Muslim dalam rangka menghilangkan rasa curiga yang disebabkan oleh penulis-penulis asing yang berkenaan dengan sejarah, seni dan kebudayaan Islam.
- 3) Menerbitkan hasil-hasil studi dalam bentuk buku-buku dan monograf untuk menciptakan suatu lingkungan pengertian dan persahabatan yang ikhlas di kalangan kaum Muslimin.
- 4) Dengan cara konsensus mengoreksi informasi yang tidak mempunyai dasarnya yang masih terdapat di dalam buku-buku teks di beberapa negara Muslim yang dapat menimbulkan perpecahan di kalangan generasi kaum Muslimin di masa yang akan datang.
- 5) Meningkatkan kerja-sama dan penukaran buku-buku di dalam bidang sejarah, seni dan kebudayaan di kalangan universitas dan lembaga-lembaga riset di negara-negara Muslim.
- 6) Menyelenggarakan seminar-seminar dan simposium-simposium, apakah pada satu Center atau di salah satu negara anggota. Juga menyelenggarakan, sekali tiap-tiap tiga tahun, kongres-kongres yang mengenai sejarah, seni dan kebudayaan di dalam salah satu negara anggota.
- 7) Menerbitkan berkala empat kali setahun dalam rangka memberikan tinjauan terhadap sejarah, seni dan kebudayaan di negara-negara Muslim dalam rangka menyebar-luaskan dasar-dasar peradaban Islam.

Ada dua belas anggota dewan pekerja, yang terdiri dari para sejarawan, sarjana dan penulis yang aktif di dalam Center ini.

Di Istanbul Turki juga menjadi tempat kedudukan dari suatu badan lain yang ada hubungannya dengan OKI yaitu *International Commission for the Islamic Heritage*. Berdasarkan kepada resolusi yang ada, keputusan untuk mendirikan komisi ini diambil dari Konperensi kesebelas para Menteri Luar Negeri yang diadakan pada tahun 1980. Adapun tujuan-tujuan dari komisi ini adalah:

- 1) Memberikan suatu pandangan yang luas, komprehensif dan sama mengenai warisan kebudayaan, meliputi monumen-monumen, kota-kota bersejarah dan tempat-tempat bersejarah lainnya, dalam rangka menambah terhadap manuskrip-manuskrip, perpustakaan-perpustakaan dan karya-karya seni.
- 2) Mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan dan merawat warisan kebudayaan di dalam kerangka Islam.
- 3) Meningkatkan kerja-sama, koordinasi dan tukar menukar ide-ide dan informasi mengenai warisan kebudayaan di dunia Islam.
- 4) Mengklasifikasi dan menerbitkan buku-buku, manuskrip-manuskrip dan sumber-sumber lain warisan Islam.
- 5) Mencari dana dan menyediakan bantuan keuangan bagi negara-negara anggota di dalam bidang ini dengan penekanan khusus terhadap warisan yang ada di Jerusalem.

5. *Islamic Center for Vocational and Technical Training and Research*

Islamic Center ini didirikan di Dhaka, Bangladesh dalam menjawab suatu resolusi OKI yang dihasilkan dalam Konperensi kesembilan para Menteri Luar Negeri yang diadakan pada tahun 1978. Adapun tujuannya adalah:

- 1) Melatih para instruktur, tehniisi, dan pedagang-pedagang di dalam bidang tehnik dan tchnologi dalam bidang yang diinginkan oleh negara-negara anggota.
- 2) Mengadakan penelitian mengenai tehnik dan pendidikan kejuruan di negara-negara anggota OKI.
- 3) Menentukan syarat-syarat yang diperlukan bagi pendidikan tehnik dan kejuruan di negara-negara anggota.
- 4) Meningkatkan kerja-sama tehnik, tukar menukar keahlian dalam bidang tehnik dan menyebar luaskan informasi dasar di dalam bidang perkembangan sumber daya manusia pada umumnya dan pendidikan kejuruan, khususnya.
- 5) Mengharmoniskan latihan-latihan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan di bidang tenaga kerja di negara-negara Muslim.

6. *Islamic Foundation for Science, Technology and Development*

OKI melalui Konperensi keenam para Menteri Luar Negeri yang diadakan di Jeddah tahun 1975 memutuskan untuk mendirikan *Islamic Foundation for Science, Technology and Development*. Fungsi dari badan ini adalah:

- 1) Meningkatkan dan mendorong kegiatan-kegiatan penelitian di dalam bidang ilmu dan teknologi, di dalam kerangka Islam dalam hubungannya untuk membantu memecahkan masalah-masalah yang sedang terjadi di dunia Islam dan pada ummat manusia, umumnya.
- 2) Meningkatkan kerja-sama dan koordinasi di dalam bidang-bidang ilmu dan teknologi di dunia Islam dalam usaha memperkuat solidaritas Islam.
- 3) Menjamin bahwa semua negara anggota OKI, baik secara perorangan maupun secara kolektif, memberikan kemungkinan yang lebih besar dalam penggunaan ilmu dan teknologi, di dalam merumuskan dan menerapkan rencana-rencana sosio-ekonomi mereka. Memperhatikan juga akan keperluan konsolidasi tentang jati diri dan ciri Islam.

7. *Islamic Center for the Development of Trade*

KTT Islam yang diadakan pada tahun 1981 memutuskan status *Islamic Center for the Development of Trade in*. Tujuan utamanya adalah:

- 1) Mendorong adanya kontak perdagangan reguler antara negara-negara anggota dan mengumpulkan informasi mengenai ciri suatu perdagangan.
- 2) Membantu untuk mengharmoniskan kebijaksanaan perdagangan bagi negara-negara anggota yang menginginkan adanya hubungan perdagangan antara mereka.
- 3) Menyeimbangkan penanaman modal dengan tujuan mengembangkan pertukaran perdagangan.

Keuangan dari Trade Center ini diambil dari kontribusi dan donasi dari sektor-sektor privat dan publik dari negara-negara anggota. Center ini sendiri berkedudukan di Casablanca, Marokko.

8. *Islamic Commission for the International Crescent*

Oki juga mendirikan *Islamic Commission for the International Crescent* yang sama dengan International Red Cross Society (Palang Merah International). Badan ini dibentuk untuk:

- 1) Memberikan bantuan medis dan meringankan penderitaan yang disebabkan oleh bencana alam.
- 2) Memberikan bantuan yang mungkin diperlukan bagi international dan organisasi-organisasi lokal yang melayani masalah-masalah kemanusiaan.

Sampai sekarang badan ini belum dapat bekerja karena belum adanya dukungan dana. Beghazi Libia diusulkan untuk menjadi tempat kedudukannya.

9. *Islamic Jurisprudence Academy*

OKI memutuskan untuk mendirikan *Islamic Jurisprudence Academy* sewaktu diadakan KTT Islam ketiga di Mekkah/Thaif tahun 1981. Melalui lembaga ini OKI menginginkan:

- 1) Meningkatkan kesatuan kaum Muslimin.
- 2) Menggiring *ummah* agar lebih rapat dengan Iman Islam dengan mempelajari masalah-masalah kehidupan modern.
- 3) Mencari putusan-putusan yang berhubungan dengan *syari'ah*, terhadap masalah-masalah yang bisa terjadi di dunia Islam. Tambahan lagi Akademi ini memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi negara anggota, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Kedudukan Akademi ini diputuskan di Jeddah.

10. *The International Islamic Law Commission*

Konferensi para Menteri Luar Negeri yang kesebelas yang diadakan di Islamabad, Pakistan, memutuskan pembentukan suatu lembaga lain yang berkenaan dengan hukum, yang berada di bawah naungan OKI. Maka lembaga dinamakan dengan *the International Islamic Law Commission* yang berkedudukan di Baghdad. Tujuan lembaga ini adalah:

- 1) Melakukan penelitian di dalam berbagai bidang, untuk mempertinggi *syari'ah*.
- 2) Menguji hukum-hukum dan naskah-naskah hukum yang diajukan oleh negara anggota yang berhubungan dengan *syari'ah*.
- 3) Mencari cara-cara dan alat-alat yang diperlukan untuk mengamankan wakil-wakil yang akan berbicara mengenai hukum Islam di hadapan mahkamah internasional.

11. *Islamic Civil Aviation Council*

Konferensi para Menteri Luar Negeri yang kedua belas tahun 1981 mendirikan *Islamic Civil Aviation Council* sebagai badan tambahan yang berada di dalam lingkungan OKI. Saudi Airlines menyusun piagam badan ini, yang sekarang masih dalam pertimbangan negara anggota. Tujuannya adalah:

- 1) Melakukan koordinasi di kalangan para negara anggota di bidang penerbangan sipil.
- 2) Memperhatikan masalah khusus yang timbul di dalam bidang penerbangan sipil.
- 3) Mempelajari kemungkinan penggunaan secara efektif transport udara di negara-negara anggota.
- 4) Kebijaksanaan yang seimbang dan koordinasi yang baik yang berhubungan dengan tarif dan transit.

Adapun badan ini berkedudukan di Tunisia.

Kesebelas lembaga-lembaga yang tersebut di atas merupakan badan-badan tambahan di dalam OKI. Lembaga-lembaga ini bertanggung jawab kepada konferensi para Menteri Luar Negeri negara anggota melalui Sekretariat Jenderal OKI.

Di samping itu terdapat pula badan-badan tambahan lainnya untuk mendukung dan melaksanakan tujuan-tujuan OKI. Dan organisasi-organisasi ini tidak bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal tetapi langsung kepada Konperensi para Menteri Luar Negeri negara anggota.

G. Badan-badan yang berafiliasi dengan OKI.

1. *Islamic Development Bank*

Badan ini sangat penting di dalam OKI. Ide pendirian Bank ini dilakukan pada Konperensi para Menteri Luar Negeri yang kedua tahun 1970. Bank itu sendiri didirikan pada tahun 1975. Bank melayani untuk membantu perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial negara-negara anggota dan masyarakat Muslim secara individu dan kolektif sesuai dengan tuntunan syari'ah.

2. *Internasional Islamic News Agency*

IINA merupakan badan khusus yang didirikan oleh OKI. Keputusan untuk mendirikan badan ini dilakukan dalam Konperensi para Menteri Luar Negeri anggota yang kedua tahun 1970. Adapun maksud dan tujuannya:

- 1) Mengembangkan hubungan yang lebih erat dan lebih baik diantara negara anggota, dalam bidang informasi.
- 2) Meningkatkan kontak dan kerja-sama teknik diantara kantor-kantor berita.
- 3) Menciptakan pengertian yang lebih baik di kalangan ummat Islam mengenai masalah-masalah sosial, ekonomi dan politik mereka.

IINA ini berkedudukan di Jeddah.

3. *Islamic States Broadcasting Organization*

OKI mendirikan ISBO ini dengan tujuan-tujuan yang sama juga, yaitu:

- 1) Menyebarkan da'wah dan meningkatkan kesadaran terhadap warisan Islam.
- 2) Meningkatkan apa yang disebut dengan masalah-masalah Islam dan untuk mendalami semangat persaudaraan islam.
- 3) Mengidentifikasi dasar-dasar politik, sosial, ekonomi dan pendidikan Islam terhadap solidaritas Islam.
- 4) Mengukuhkan hubungan-hubungan di kalangan para anggota terhadap dasar-dasar ini.
- 5) Mengadakan planning untuk mengkoordinasi transmissi-transmissi radio, program penyiaran, dan informasi teknologi di kalangan negara-negara anggota dengan semangat solidaritas persaudaraan Islam.
- 6) Memproduksi radio dan program-program televisi dalam rangka melanjutkan tujuan-tujuan OKI.

4. *Islamic Chamber of Commerce, Industry and Commodity Exchange*

Konperensi kesepuluh para Menteri Luar Negeri diadakan di Fez, Marok-

ko tahun 1978 mengusulkan didirikannya *Islamic Chamber of Commerce*, dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan dan mendorong perdagangan, industri dan kerajinan tangan di kalangan negara anggota.
- 2) Membuat rekomendasi-rekomendasi untuk menjaga minat-minat dalam bidang ekonomi dan bisnis di dunia Islam.
- 3) Meningkatkan kerja-sama di kalangan kamar-kamar dagang di negara-negara anggota dan perdagangan internasional lainnya, organisasi-organisasi pertanian dan industri.
- 4) Tukar menukar delegasi-delegasi dagang dan menyelenggarakan pekan-pekan perdagangan, exhibitions, seminar-seminar, ceramah-ceramah dan penyebaran publisitas.
- 5) Meningkatkan kesempatan penanaman modal, dan usaha-usaha patungan di kalangan negara anggota.
- 6) Menyediakan arbitrase di dalam pelaksanaan perdagangan, dan persengketaan-persengketaan industri.
- 7) Meningkatkan pertukaran manajemen perdagangan, teknik dan industri serta informasi yang ilmiah dan kemampuan teknik di kalangan para anggota.

Chamber of Commerce ini berkedudukan di Karachi.

5. *Islamic Shipowners Association.*

The Islamic Shipowners Association didirikan pada KTT Islam yang ketiga tahun 1981, tujuan dan fungsinya adalah:

- 1) Mengkoordinasi dan menyatukan usaha-usaha anggota dalam merealisasi kerja sama di kalangan perusahaan-perusahaan maritim.
- 2) Melindungi keinginan para anggota dengan memberikan dukungan yang besar di dalam masalah-masalah kemaritiman internasional.
- 3) Mengadakan kontak antara dunia Islam dan negara-negara lain di dalam suatu jaringan maritim yang terintegrasi.
- 4) Mengembangkan muatan reguler dan priodik dan perjalanan-perjalanan penumpang diantara negara-negara Muslim dengan negara-negara lainnya.
- 5) Membantu untuk menggarap kebijaksanaan yang sama bagi transportasi maritim dunia Islam.
- 6) Melakukan studi dan penelitian di dalam berbagai macam disiplin ilmu transportasi kemaritiman.

Assosiasi ini berkedudukan di Jeddah.

6. *Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization*

OKI mendirikan ISESCO ini yang sama polanya dengan UNESCO, yang berdasarkan dengan suatu resolusi yang dikeluarkan pada Konperensi kesebelas para Menteri Luar Negeri tahun 1980, yang tujuannya adalah untuk:

- 1) Memperkuat koordinasi di kalangan negara anggota di dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan penelitian kebudayaan dan menjadikan kebudayaan Islam sebagai poros kurikulum untuk semua tingkat.
- 2) Mendukung kebudayaan Islam yang nyata adanya dan melindungi kebebasan pemikiran Islam, menentang unsur-unsur invasi kebudayaan, distorsi dan penurunan nilai.
- 3) Mendorong kerja sama di kalangan negara anggota di dalam bidang penelitian ilmiah, mengembangkan ilmu terapan dan mempergunakan teknologi canggih di dalam kerangka nilai-nilai Islam yang permanen, serta merawat ciri-ciri peradaban Islam.
- 4) Mencari cara-cara dan alat-alat untuk melindungi identitas Islam bagi penduduk Muslim di negara non-Muslim.
- 5) Mendukung pengertian di kalangan rakyat sedunia dan membantu untuk mencapai perdamaian dan keamanan di dunia dengan segala alat yang ada terutama melalui pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
- 6) Mengadakan koordinasi di kalangan lembaga-lembaga khusus yang ada dalam lingkungan OKI dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dan dengan semua negara anggota OKI dengan pandangan ingin mengadakan solidaritas Islam dan kebudayaan di dunia Islam.

ISESCO ini berkedudukan di Rabat, Maroko.

7. *Organizations of Islamic Capitals*

Organisasi ini didirikan pada tahun 1978 oleh OKI berdasarkan resolusi yang dikeluarkan oleh Konferensi kesembilan para Menteri Luar Negeri. Adapun tujuannya adalah:

- 1) Mengembangkan kerja sama di kalangan ibu-kota Islam dan memelihara warisan dan karakter mereka.
- 2) Meningkatkan pelayanan umum melalui tukar menukar kunjungan, penelitian, studi dan keahlian di kalangan ibu kota Islam dan mencapai suatu ruang lingkup yang lebih luas untuk interaksi di dalam kebudayaan, sosial dan planning pembangunan.
- 3) Menyelenggarakan konferensi-konferensi untuk membahas pokok-pokok yang diinginkan bagi ibu kota di dunia Islam dan memberi rekomendasi keputusan-keputusan yang layak.

Kedudukan organisasi ini di Mekkah.

Kesebelas badan-badan tambahan ini dan ketujuh badan-badan yang berafiliasi di dalam OKI ini merupakan lembaga-lembaga khusus. Sebagai bukti di dalam tujuan-tujuan ini, mereka sudah menciptakan dalam rangka membantu untuk memperkuat kerja-sama di kalangan anggota OKI di dalam berbagai-bagai bidang.

Demikianlah secara ringkas disajikan di sini mengenai Organisasi Konferensi Islam dengan mempergunakan karya 'Abdullah al-Ahsan sebagai referensinya, yang menurut hemat kami telah dapat memberikan informasi yang terarah dan teratur, sehingga apa yang selama ini kita ikuti melalui mass media dapat menyegarkan kita kembali mengenai latar belakang peristiwanya.

Kalau sekiranya badan-badan khusus yang dibentuk dan berafiliasi dengan OKI ini berjalan dengan efektif, sungguh merupakan kemajuan besar yang dapat memberikan manfa'at bagi negara anggotanya. Di dalam bidang politik internasional nampaknya organisasi ini tidak begitu berwibawa untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi. Misalnya konflik Irak-Iran, sama sekali OKI tidak berdaya untuk menyelesaikannya sendiri. Demikian pula masalah Irak dengan Kuwait, sehingga harus Amerika Serikat yang angkat senjata yang menyelesaikannya. Dalam bidang ekonomi, nampaknya negara anggota yang kaya dana tidak mau menyumbangkan dananya dalam jumlah yang besar bagi kemajuan negara anggotanya, terutama di dalam bidang pengembangan pendidikan, kebudayaan, ilmu dan teknologi. Padahal uang tersebut kadang-kadang habis puluhan miliar dollar untuk biaya perang. Walaupun demikian adanya OKI ini dapat juga memberikan manfa'at bagi negara anggotanya, namun yang diharapkan tentu lebih maju lagi.